

## PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI SUMATERA UTARA PADA TAHUN 2006-2020

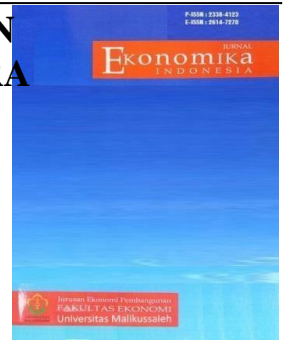
Febby Irma Fazaryani<sup>a</sup> Reza Juanda<sup>b</sup>,

[Febbyirma@unimal.ac.id](mailto:Febbyirma@unimal.ac.id) [juanda.reza@unimal.ac.id](mailto:juanda.reza@unimal.ac.id)

<sup>ab</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

Corresponding author :

[juanda.reza@unimal.ac.id](mailto:juanda.reza@unimal.ac.id)



### ARTICLE INFORMATION

#### Keywords:

*Investment, Labor, Government Expenditure, Poverty.*

#### ABSTRACT

*This study examined and analyzed the effect of Investment, Labor, and Government Expenditure on Poverty in North Sumatra and used secondary data from 2006 to 2020. The regression model used was a multiple linear regression model using the Ordinary Least Square (OLS) method and classical assumption tests, consisting of a normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, and heteroscedasticity test. The regression tool used was the Eviews 10. According to the result indicated that the realization of investment and the realization of government expenditures did not and insignificantly affect the number of poor people in North Sumatra, and labor negatively and significantly affected the number of poor people in North Sumatra. Simultaneously, the realization of investment, labor, and government expenditure influenced the number of poor people in North Sumatra. The coefficient of determination test results showed a relationship between the independent and dependent variables of 66.55%, and the rest of 33.44% was influenced by other variables outside this study.*

### 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu masalah utama yang diperhatikan oleh Indonesia. Kemiskinan adalah masalah di negara-negara berkembang serta di negara-negara berkembang. Berbagai pendekatan, metodologi dan langkah-langkah untuk mengurangi kebutuhan telah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung di tingkat lingkungan dan masyarakat (Ratih et al., 2017). Kebutuhan tidak terbatas pada jumlah dan tingkat individu yang melarat. Satu lagi perspektif yang perlu dipertimbangkan adalah kedalaman dan keseriusan kemiskinan. (Baharuddin, 2015).

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah melakukan banyak proyek untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu bagian penting dari prosedur pengurangan kemiskinan adalah aksesibilitas informasi yang akurat. Pada saat informasi bebas, otoritas publik dapat sampai pada kesimpulan tentang bagaimana seharusnya menjaga ini otoritas publik dapat menganalisis kemalangan setiap tahun.

Ada beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki berbagai fakir miskin, salah satunya adalah Sumatera Utara, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (Statistik, 2021) jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara berada di urutan keempat, yaitu 1,3 juta. individu, ketiga Jawa Tengah dengan 4,1 individu, kedua Jawa Barat dengan 4,2 juta individu dan posisi utama adalah wilayah Jawa Timur dengan 4,6 juta individu.

Menurut Arsyad dalam Ketaren (2018), sejak awal, upaya peningkatan Negara Berkembang (NSB) diibaratkan dengan upaya pembayaran per kapita. Dengan peningkatan pembayaran per kapita, diyakini bahwa isu-isu, misalnya, kemiskinan dan perluasan penyebaran gaji seharusnya ditangani oleh NSB, namun kenyataannya tidak. Hal ini terjadi karena Produk Nasional Bruto atau Produk Domestik Bruto tidak terlalu peka terhadap masalah dan kemiskinan. Selain itu, kelompok kaya dan miskin semakin berkembang dengan perkembangan ekonomi yang cepat. Salah satu misi otoritas publik

yang harus dilakukan di bawah otoritas yang sah adalah antisipasi dan penguatan daerah. Keduanya mencakup sudut pandang moneter yang sangat ekspansif, baik dari perspektif keuangan, sosial, sosial dan politik. Kondisi kemiskinan, investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara 5 tahun terakhir dilihat pada tabel

**Data Kemiskinan (K), Investasi (INV), Tenaga Kerja (TK) dan Pengeluaran Pemerintah (PP) di Sumatera Utara Tahun 2016-2020**

Tahun	K	INV	TK	PP
2016	1455,95	4.954,829	6.362	9.476,42
2017	1453,87	11.683,63	6.743	12.518,86
2018	1324,98	8.371,820	7.124	12.563,39
2019	1282,04	19.749,00	7.063	13.440,32
2020	1283,29	18.189,50	7.350	15.543,90

Sumber: BPS Sumatera Utara(2021)

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa dari tahun 2016 – 2020 data investasi di Sumatera Utara telah berubah. Angkatan kerja dari data angkatan kerja 2016 – 2020 mengalami perluasan dimana pada tahun 2020 terdapat 7.350 orang. Pengeluaran Pemerintah dari pengakuan data pengeluaran pemerintah selama 5 tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Usaha, pekerjaan, dan pengeluaran pemerintah berhubungan dengan kemelaratan.

Fenomena menarik terjadi pada kemiskinan yang meningkat dari 1282,04 orang pada tahun 2019 menjadi 1283,29 orang pada tahun 2020, usaha telah berkurang dari tahun 2019 sebesar Rp 19.749,00 miliar menjadi Rp 18,189,50 Miliar pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan kemiskinan dan usaha memiliki dampak yang merugikan, seperti penelitian Sukirno dalam Air (2013), investasi yang dibuat oleh daerah akan terus memperluas aksi ekonomi dan membuka pintu kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan lebih mengembangkan bantuan pemerintah daerah. Pekerjaan ini berasal dari beberapa elemen penting dari latihan investasi, khususnya (1) usaha adalah bagian dari konsumsi lengkap, sehingga spekulasi yang diperluas dapat meningkatkan total bunga, gaji publik, dan memanfaatkan pintu terbuka spekulasi; (2) perluasan penciptaan dari usaha akan meningkatkan batas penciptaan; (3) usaha terus-menerus diikuti oleh pergantian peristiwa yang inovatif.

Berdasarkan tabel 1.1, tenaga kerja telah berkembang secara konsisten, kemiskinan telah berkurang pada tahun 2016 - 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan dan kemiskinan berdampak pada hipotesis (Alkamah et al., 2021)

bahwa pekerjaan adalah salah satu aset finansial penciptaan. tenaga kerja dan produk. Penyerapan pekerjaan akan meningkatkan bantuan pemerintah karena pekerjaan akan menciptakan upah untuk mengatasi masalah kehidupan, sehingga semakin banyak pekerja yang dapat mengatasi kebutuhan akan berkurang. Bagaimanapun, posisi terbuka yang dapat diakses tidak secara langsung berhubungan dengan angkatan kerja yang dapat diakses, sehingga angkatan kerja yang berasimilasi tidak diimbangi dengan angkatan kerja yang dapat diakses dan dengan cara ini akan mempengaruhi aksesibilitas pekerjaan yang berdampak pada kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah meningkat dari tahun 2016 - 2020 sementara blunder pada tahun 2016 - 2018 telah berkurang, namun pada tahun 2019 - 2020 telah meluas. Sesuai Dumairy dalam Sunusi et al., (2014), dinyatakan bahwa Pemerintah membakar melalui potongan besar perubahan pada latihan yang berbeda. Konsumsi ini tidak hanya digunakan untuk menjalankan tugas pemerintah sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung latihan moneter. Ini tidak berarti bahwa otoritas publik terkait dengan latihan bisnis, tetapi otoritas publik harus mendorong latihan moneter secara keseluruhan. Pemerintah yang baik harus selalu berusaha untuk menghindari dan mengatasi kekecewaan pasar untuk menjadi mahir.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2003), kemiskinan adalah ketidakberdayaan untuk mencapai cara hidup dasar. Masalah harapan rendah untuk kenyamanan sehari-hari juga terkait dengan gaji rendah (kemiskinan), penginapan yang tidak menguntungkan, kelemahan kronis dan manfaat klinis, dan tingkat SDM yang rendah.

Sesuai Royat dalam Ferezagia (2018), salah satu masalah yang masih dihadapi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Isu kemelaratan memang membingungkan dan berubah menjadi kebutuhan perbaikan. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia memiliki banyak program mitigasi kemiskinan. Ada dua sistem yang harus dianut dalam upaya mengurangi kebutuhan. Untuk mulai dengan, lindungi keluarga yang tidak beruntung dan pertemuan lokal dengan memenuhi berbagai disiplin ilmu. Kedua, berikan persiapan kepada mereka sehingga mereka dapat melakukan upaya untuk mencegah misi baru. Upaya pelonggaran kebutuhan dilakukan untuk memahami keyakinan negara untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

## Investasi

Menurut Murni (2006), investasi adalah konsumsi masyarakat untuk perolehan produk modal. Spekulasi juga dapat diartikan sebagai penggunaan yang dilakukan oleh daerah, terutama para visioner bisnis dan juga dapat dilakukan oleh otoritas publik untuk membeli barang modal, peralatan produksi.

Menurut Herman dalam Ratih et al (2017), perluasan usaha dapat secara positif memperluas jumlah jabatan sehingga perluasan spekulasi diharapkan diikuti oleh retensi jumlah tenaga kerja.

## Tenaga Kerja

Menurut Sudarsono (2009), buruh adalah orang-orang yang siap atau siap untuk bekerja, termasuk orang-orang yang bekerja secara mandiri atau keluarganya yang tidak mendapatkan upah atau yang mendapat imbalan, orang-orang yang tidak siap bekerja sejak mereka bekerja. terpaksa karena fakta bahwa mereka memperlambat posisi terbuka.

## Pengeluaran Pemerintah

Seperti yang ditunjukkan oleh Amalia et al., (2015), pengeluaran pemerintah adalah salah satu bagian moneter yang berarti untuk memperluas laju spekulasi, membuka pintu bisnis, menjaga ketergantungan finansial dan membuat alokasi gaji yang merata. Hipotesis skala penuh perkembangan belanja pemerintah dikemukakan oleh para analis keuangan dan dapat disusun menjadi model peningkatan kemajuan penggunaan.

Pengeluaran Pemerintah mencerminkan strategi pemerintah. Ketika otoritas publik menetapkan strategi untuk membeli tenaga kerja dan produk, penggunaan mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh otoritas publik untuk menjalankan strategi. Jelas, otoritas publik tidak hanya memanfaatkan, tetapi juga memperoleh pendapatan. Pekerjaan ini dapat dilakukan sebagai syafaat langsung atau berputar-putar (Sunusi et al., 2014).

## 3. METODE PENELITIAN

### Objek dan Lokasi

Objek dalam ulasan yaitu investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara sebagai faktor otonom, kemiskinan di Sumatera Utara sebagai variabel penentu. Wilayah dalam pemeriksaan ini adalah Provinsi Sumatera Utara.

### Jenis dan Sumber Informasi

Jenis informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah informasi opsional. Informasi tambahan itu sendiri adalah informasi yang menjunjung tinggi informasi penting, tepatnya semua jenis informasi yang diperoleh melalui tulisan (library research) seperti majalah, buku

harian, artikel atau dari berbagai hasil eksplorasi masa lalu yang terkait dengan percakapan dalam proposisi ini.

## Metode Pengumpulan Data

Teknik pemilihan merupakan langkah penting untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini para analis menggunakan teknik pengumpulan informasi dengan mengambil informasi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dibutuhkan oleh para ilmuwan, termasuk investasi, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, dan jumlah orang miskin selama lima belas tahun (tahun). 2006 hingga 2020).

## Metode Analisis Data

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai model pemeriksaan kekambuhan langsung (Multiple Regression Model). Regresi Linier Berbeda adalah model regresi langsung yang menggabungkan lebih dari satu faktor atau indikator bebas. Berbagai Regresi Linier adalah model kekambuhan yang berbeda jika tidak sepenuhnya diselesaikan oleh rentang informasi atau proporsi (kuantitatif atau matematis). Sedangkan faktor otonom adalah regangan atau proporsi informasi. Namun ada juga kekambuhan langsung di mana faktor otonom menggunakan informasi skala nyata atau ordinal, yang lebih masuk akal untuk menyebutnya informasi palsu, kemudian, pada saat itu, regresi langsung seperti itu disebut kekambuhan langsung dengan faktor palsu. Berbagai pemeriksaan kekambuhan langsung untuk penelitian ini menggunakan program Eviews 10. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 INVt + \beta_2 TKt + \beta_3 PPt + e$$

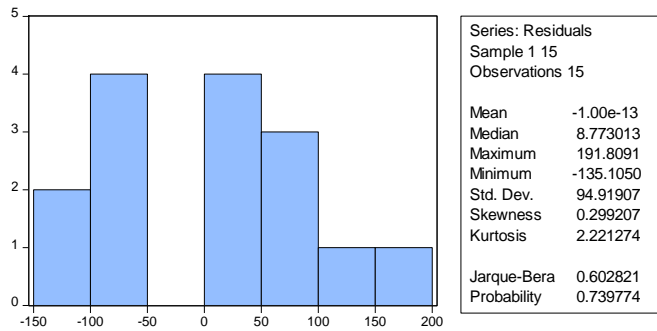
Keterangan: Y=Kemiskinan, INV=Investasi, TK=Tenaga Kerja, PP=Pengeluaran Pemerintah, t=Periode/Rentang Waktu,  $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3$ = Koefisien Regresi Variabel Bebas,  $e$  =Standar Error/Variabel

## 4. HASIL PENELITIAN

### Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas berencana untuk menguji apakah model kekambuhan dari faktor yang membuat frustrasi atau faktor yang tersisa memiliki penyebaran yang khas atau tidak. Alasan arah bergantung pada kemungkinan  $> 0,05$  maka populasi tersebut biasanya tersebar dan jika peluangnya  $< 0,05$  maka populasi tersebut biasanya tidak beredar.

Konsekuensi penanganan informasi dari uji ordinality harus terlihat pada gambar berikut:



Dari citra mendekati uji normalitas menggunakan teknik Jarque-Bera (JB-Test), hasil eksperimen menghasilkan kemungkinan > 0,05 (0,739774 > 0,05). Mengingat hasil ini, dapat dikatakan bahwa model regresi normal.

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**Uji Multikolinieritas**

Multikolinieritas berencana untuk menguji apakah ada hubungan yang tinggi atau ideal antara faktor-faktor bebas yang terdapat dalam model relaps. Model relaps yang baik seharusnya tidak memiliki hubungan antara faktor bebas. Multikolinieritas harus terlihat dari Variance Inflation Factors (VIF). VIF bagaimana melihat fluktuasi kenaikan penilai karena ada multikolinieritas dalam model yang tepat. Jika VIF suatu variabel melebihi 10, variabel tersebut dianggap sangat terkait (Gujarati, 2012).

Berikut hasil uji multikolinieritas:

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	392255.7	513.1191	NA
INV	0.000116	10.44263	5.450552
TK	1.18E-08	641.5201	3.740033
PP	0.000308	30.36093	7.201224

Sumber: (Eviews 10 Data Diolah, 2022)

Melihat tabel di atas, sangat terlihat bahwa tidak ada faktor bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini terbebas dari multikolinieritas.

**Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi artinya menguji apakah pada model straight relapse terdapat kesalahan juggling pada periode t dengan blunder pada periode t-1 (lalu). Jika ada hubungan, muncul isu autokorelasi. adanya efek samping autokorelasi pada relaps menyebabkan model selanjutnya tidak dapat digunakan untuk nilai variabel bergantung dari faktor bebas tertentu.

F-statistic	0.4752	Prob. F(2,9)	0.6365
Obs*R-squared	1.4327	Prob. Chi-Square(2)	0.4885

Tabel di atas menunjukkan nilai Prob. Chi-Square (2) yang merupakan nilai p dari uji coba Breusch-Godfrey Serial Correlation LM sebesar 0,4885. Prob harga diri. Chi-Square(2) ternyata lebih menonjol dari tingkat kepentingan 5% atau 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah autokorelasi.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas adalah suatu kondisi dimana fluktuasi setiap permasalahan tidak tetap. Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mengidentifikasi apakah dalam tinjauan ini terdapat heteroskedastisitas dengan melihat nilai kemungkinan. Adanya heteroskedastisitas dapat membuat penilaian koefisien relaps menjadi boros. Model relaps yang layak adalah model yang terbebas dari efek samping heteroskedastisitas.

Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas:

F-statistic	0.54440	Prob. F(9,5)	0.7983
Obs*R-squared	7.42399	Prob. Chi-Square(9)	0.5931
Scaled explained ss	2.43794	Prob. Chi-Square(9)	0.9825

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai p value ditunjukkan dengan nilai Prob. Chi-Square memiliki nilai yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05 (0,5931 > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi yang dipakai tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

**Estimasi Regresi Linear Berganda**

Adapun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 3504.129 + 0.014417INV - 0.000307TK - 0.018716PP$$

Interpretasi: Nilai konstanta sebesar 3504.129 yang artinya apabila variabel investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah bernilai konstan = (0) atau tetap maka jumlah penduduk miskin akan bernilai konstan sebesar 3504.129 juta jiwa. Nilai koefisien variabel realisasi investasi sebesar 0.014417 apabila realisasi investasi mengalami peningkatan sebesar 1 milyar rupiah maka jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 14417 juta jiwa dengan asumsi variabel angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah dianggap tetap. Koefisien variabel angkatan kerja mempunyai nilai sebesar - 0.000307 jika jumlah angkatan kerja meningkat 1 jiwa maka jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 30 juta dengan asumsi variabel realisasi investasi dan pengeluaran pemerintah dianggap tetap. Koefisien variabel realisasi pengeluaran pemerintah mempunyai nilai sebesar - 0.018716 jika pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 1 milyar maka jumlah penduduk miskin

mengalami penurunan sebesar 18716 juta jiwa dengan asumsi variabel realisasi investasi dan angkatan kerja dianggap konstan.

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### Hasil Pengujian Parsial

spekulasi menggunakan uji-t, menggunakan derajat kepastian (tingkat kritis) atau = 0,05 atau = 5% dengan pengaturan, dimana pengujian yang dilakukan adalah dengan mencoba standar pilihan jika  $T_{hitung} > T_{tabel}$  pada = 5%, spekulasi H1 ditolak dan mengakui spekulasi H2 sedangkan jika  $T_{hitung} < T_{tabel}$  pada = 5%, teori H2 ditolak dan spekulasi H1 diakui.

Berikut ini hasil uji parsial:

Variabel Bebas	t-stat	t-tabel	Prob	Ket
Realisasi Investasi	1.34	1.80	0.208	Tidak Signifikan
Angkatan Kerja	-2.82	1.80	0.016	Signifikan
Realisasi Pengeluaran Pemerintah	-1.07	1.80	0.309	Tidak Signifikan

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai t-hitung investasi adalah 1,337586 lebih rendah daripada t-tabel yaitu 1,79588 ( $1,337586 < 1,79588$ ) menyiratkan bahwa pengakuan spekulasi tidak ada bedanya dan tidak penting pada jumlah individu yang membutuhkan di Utara Sumatra. Hal ini cenderung dilihat dari kemungkinan esteem yang lebih besar dari 0,05 ( $0,2080 > 0,05$ ).

Variabel jumlah angkatan kerja adalah 2.816925 yang lebih besar dari 1.79588 ( $2.816925 > 1.79588$ ) yang berarti bahwa jumlah tenaga kerja mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Hal ini cenderung dilihat dari kemungkinan esteem lebih sederhana dari 0,05 ( $0,0168 < 0,05$ ).

Variabel pengeluaran pemerintah adalah 1,065665 yang lebih kecil dari 1,79588 ( $1,065665 < 1,79588$ ) yang berarti bahwa pengakuan belanja pemerintah tidak ada bedanya dan tidak besar terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Hal ini cenderung dilihat dari kemungkinan bahwa kemungkinan esteem lebih penting dari 0,05 ( $0,3094 > 0,05$ ).

#### Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

investasi menggunakan uji F, menggunakan tingkat kepastian (huge level) atau = 0,05 atau = 5% dengan pengaturan, dimana pengujian yang digunakan adalah Pengujian Kriteria Keputusan jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada = 5%, teori H1 adalah menolak dan mengakui spekulasi H2 sedangkan jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada = 5%, teori H2 ditolak dan spekulasi H1 diakui.

Berikut ini hasil uji simultan:

F-Statistik	F-Tabel	Prob	Keterangan
10.28650	3.59	0.001598	Signifikan

Sumber: (Eviews 10 Data Diolah, 2022)

Nilai pengukuran F lebih menonjol daripada F tabel, dan itu menyiratkan bahwa investasi terhadap tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah bersama-sama mempengaruhi kebutuhan.

#### Koefisien Hasil Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinan atau uji  $R^2$  digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan antara faktor bebas dengan variabel terikat. Nilai koefisien jaminan berada di suatu tempat di kisaran tidak ada dan satu. Jika nilai Adjusted R-Squared lebih seperti nol, itu berarti bahwa hubungan antara variabel otonom dan variabel yang mempengaruhi sangat lemah. Nilai R-Squared yang berubah lebih mirip satu, kemudian, pada saat itu, hubungan antara faktor-faktor dan variabel dengan asumsi itu adalah area kekuatan untuk luar biasa.

	Mean dependent	
R-squared	0.73721 var	1478.0
Adjusted R-squared	S.D. dependent	
S.E. of regression	0.66554 var	185.16
Sum squared resid	Akaike info	
Log likelihood	107.083 criterion	12.408
F-statistic	Schwarz	
Prob(F-statistic)	126134. criterion	12.597
	- Hannan-Quinn	
	89.0620 criter.	12.406
	Durbin-Watson	
	10.2865 stat	1.3597
	0.00159	

Sumber: (Eviews 10 Data Diolah, 2022)

Dari tabel di atas, cenderung terlihat bahwa Adjusted R-Squared esteem dalam penelitian ini adalah 0,665548. Artinya, hubungan antara variabel otonom dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah 66,55%. Terlebih lagi,  $1 - 0,665548 = 0,334452$  yang berarti 33,44% lainnya dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar ulasan ini.

#### Hasil Uji Koefisien korelasi (R)

Koefisien sambungan adalah suatu nilai yang menunjukkan apakah hubungan langsung antara dua faktor bidang kekuatan adalah. Nilai koefisien koneksi berfluktuasi dari - 1 hingga +1, r yang mendekati - 1 atau +1 menunjukkan area kekuatan untuk a antara dua faktor, dan nilai r yang mendekati 0 adalah lemah. Dalam tinjauan ini, harga koneksi (r) atau R-Squared adalah 0,737216 atau 73,72, sehingga dalam penelitian ini sangat

baik dapat diamati bahwa ada hubungan antara faktor dan faktor bebas.

## **Pembahasan**

### **Hubungan Realisasi Investasi dengan Jumlah Penduduk Miskin**

Mengingat konsekuensi dari pengakuan informasi di atas, cenderung terlihat bahwa variabel investasi mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara karena kemungkinan nilai 0,2080 lebih besar daripada tingkat besar 0,05, koefisien konsumsi pemerintah adalah 0,014417.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Gumala dan Anis (2019), mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi tidak penting untuk kemiskinan di ASEAN. Dampak tidak relevan dari spekulasi pada kemiskinan di ASEAN terjadi ketika bisnis hanya digunakan dalam organisasi saat ini karena sebagian besar benar-benar membutuhkan inovasi dan kemampuan rendah sehingga individu yang tidak mendekati organisasi spekulasi tidak membuat pekerjaan untuk mereka.

### **Hubungan Angkatan Kerja Terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Berdasarkan hasil olah data di atas bahwa dapat diketahui bahwa variabel angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara disebabkan nilai probabilitasnya sebesar 0.0168 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05, koefisien tenaga kerja sebesar -0.000307.

Hasil penelitian ini sesuai penelitian (Wahyudi dan Yuliarmi, 2018), yang menyatakan bahwa kemajuan moneter menengahi keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pekerja dapat mengurangi kekecewaan melalui perbaikan keuangan lingkungan. Peningkatan orang dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong dan pencegah perubahan keuangan. Populasi umum akan membangun jumlah pekerja dan perkembangan ini memungkinkan suatu daerah untuk memperluas penciptaan untuk memenuhi pasar lokal yang sedang berkembang. Dengan jumlah produk yang dibutuhkan, tenaga kerja yang dibutuhkan akan bertambah. Pekerjaan yang diperpanjang untuk membuat pekerjaan dan barang dapat mengurangi secara tidak langsung mengurangi jumlah orang yang tidak memiliki uang.

### **Hubungan Realisasi investasi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Mengingat efek samping dari penanganan informasi di atas, sangat mungkin terlihat bahwa variabel investasi mempengaruhi kemiskinnan di

Sumatera Utara dengan alasan nilai kemungkinan 0,3094 lebih penting daripada derajat kritis 0,05, koefisien pengakuan belanja pemerintah adalah - 0,018716.

Hasil review tersebut sesuai dengan eksplorasi Pateda et al., (2019), dengan hasil bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gorontalo. Pengeluaran pemerintah adalah metode terbaik untuk mediasi pemerintah dalam perekonomian. Sampai saat ini, kecukupan pengeluaran pemerintah dapat diperkirakan dari seberapa besar pembangunan keuangan yang dicapai.

## **1. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh variabel investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial realisasi investasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.
2. Secara parsial angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.
3. Secara parsial realisasi pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.
4. Secara Simultan realisasi investasi, angkatan kerja, dan realisasi pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.

### **Saran**

Dilihat dari penelitian dan akhir yang telah diberikan, cenderung diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus membuat strategi dan berperan besar untuk mengurangi jumlah orang miskin di Sumatera Utara. Otoritas publik juga diharapkan memiliki pilihan untuk membuat strategi dengan mengurangi tingkat kerjasama, misalnya, memberikan pendidikan dan persiapan pekerjaan, memperluas posisi terbuka, menciptakan dan memperluas latihan kewirausahaan yang dilengkapi dengan persiapan luar biasa dari dinas atau terkait, dan memberdayakan industrialisasi. di wilayah moneter di daerah pedesaan, untuk mempertahankan satu ton pasokan tenaga kerja. Dengan pendekatan ini, tingkat kebutuhan di suatu tempat juga akan berkurang.
2. Bagi kalangan skolastik dan spesialis cenderung

digunakan sebagai sumber bahan perspektif untuk kajian tambahan yang tertarik melihat Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara, untuk tujuan pembicaraan tambahan.

3. Organisasi terkait seharusnya memberikan informasi yang lengkap untuk penerimaan sederhana untuk informasi publik dan ilmuwan lebih lanjut.

## DAFTARPUSTAKA

- Alkamah, M., Sinring, B., & Baharuddin, D. (2021). Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal.Fe.Umi.Ac.Id*, 4(3). <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/paradoks/article/view/743>
- Amalia, R., Rahman Razak, A., Kunci, K., & Pemerintah, P. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Analisis*, 4(2), 183–189.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. (2021). *Sumatera Utara Dalam Angka 2021*.
- Baharuddin, S. (2015). Data kemiskinan indonesia 2015.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1, 1–6.
- Gujarati, D. N. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika, Buku 2 Edisi 5*. Salembah Empat.
- Gumala, F., & Anis, A. (2019). Pengaruh Korupsi, Kualitas Pembangunan Manusia Dan Penanaman Modal Asing (Fdi) Terhadap Kemiskinan Di Asean. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 541. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i2.6267>
- Rahmayani, P., & Andriyani, D. (2022). Pengaruh Dana Bantuan Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 5(2), 1-10.
- Ketaren, I. C. (2018). Pengeluaran Pemerintah Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Skylandsea*, 2(2), 116–121.
- Kuncoro. (2003). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan (Cetakan Ed)*. APP AMP YPKN.
- Murni, A. (2006). *Ekonomika Makro Edisi Revisi*. PT Refika Aditama.
- Pateda, Y.-, Masinambow, V. A. J., & Rotinsulu, T. O. (2019). Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Gorontalo. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 1–17. <https://doi.org/10.35794/jpek.d.16455.19.3.2017>
- Ratih, G. A. P. A., Utama, M. S., & Yasa, I. N. M. (2017). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1(6), 29–54. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/24472/16623/>
- Statistik, B. P. (2021). *Badan Pusat Statistik*.
- Sudarsono. (2009). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*.
- Sunusi, D. K., Kumenaung, A., & Rotinsulu, D. (2014). Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 120–137.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Andi.
- Udara, R. (2013). Investasi Dan Tenaga Kerja Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Kemiskinan *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 2–3.
- Wahyudi, I. P. A. R., & Yuliarmi, N. N. (2018). Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat kemiskinan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 10(3), 1187–1218.

